

**PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PENINGKATKAN KEDISIPLINAN BERKENDARA DI
KOTA BANDAR LAMPUNG**

Disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah
Metode Penelitian Administrasi Publik

Disusun Oleh:

I Kadek Dio Okta Kusuma (2256041033)

Dosen Pengampu:

Intan Fitri Meutia, S.A.N., M.A., Ph.D



Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Bandar Lampung

2023

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disiplin berkendara merupakan sikap penting yang harus dimiliki oleh semua pengendara atau pengemudi agar dapat sampai dengan selamat di tempat tujuan. Disiplin merupakan sebagai sikap hormat, mematuhi dan mentaati peraturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta dapat menerapkan tanpa mengeluh menerima sanksi jika melanggar peraturan tersebut. Sikap disiplin dalam berkendara ini menyangkut keselamatan dan keamanan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Sikap disiplin berkendara ini menjadi penting karena berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas. Ketertiban lalu lintas ialah keadaan kondusif bagi masyarakat untuk memanfaatkan jalan secara teratur, tertib dan lancar, atau untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data administrasi kependudukan pada tahun 2021, jumlah penduduk di Kota Bandar Lampung adalah sebanyak 1.184.949 jiwa (Disdukcapil Kota Bandar Lampung). Pertumbuhan dan perkembangan penduduk secara signifikan akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan volume kepadatan lalu lintas, yang tentunya juga berpengaruh pada kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Lebih lanjut, organisasi sektor publik yang memiliki peran dalam mengatur lalu lintas secara tertib dan aman adalah dinas perhubungan. Dinas perhubungan adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas Jalan dan Angkutan Jalan. Dinas Perhubungan memiliki peran yang penting terkait bagaimana masyarakat berlalu lintas dengan menerapkan sikap disiplin dalam berkendara. Selain itu, pengguna jalan harus berperan aktif dalam meningkatkan kesadarannya agar dapat mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku dan dengan demikian dapat menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Kesadaran masyarakat merupakan kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus

dijalankannya. Dalam menerapkan sikap disiplin berkendara, maka dibutuhkan kesadaran hukum dari masyarakat mengingat pentingnya keselamatan dan keamanan dalam mengendarai kendaraan, baik bermotor maupun bermobil. Kesadaran hukum ini merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang peraturan yang harus dilaksanakan. Sikap tersebut dapat dilihat ketika masyarakat mengabaikan peraturan lalu lintas ketika sedang mengendarai kendaraan, seperti tidak mematuhi rambu lalu lintas, tidak memakai atribut berkendara sesuai anjuran, serta tindakan lain yang dapat memberikan dampak buruk bagi pengendara dan tidak sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Sikap abai ini dapat menjadi tolok ukur kurangnya kesadaran hukum pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan berupaya untuk meningkatkan ketertiban berlalu lintas dengan memperhatikan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara. Namun faktanya, peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia berdampak signifikan terhadap permasalahan lalu lintas secara umum. Tingginya angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini antara lain disebabkan oleh rendahnya pengetahuan tentang norma dan aturan hukum lalu lintas yang masih didominasi oleh pelajar yang belum cukup umur. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran akan peraturan berlalu lintas manusia sebagai pemakai jalan merupakan faktor yang melatarbelakangi pelanggaran lalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan kepada semua pihak untuk turut serta mematuhi lalu lintas pada saat berkendara di wilayah jalan publik. Akan tetapi, sampai saat ini penerapan aturan yang ideal tersebut bukan menghadapi masalah. Justru menurut fakta, antara apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*) dengan apa yang sebenarnya terjadi sehari-hari (*das sein*) seringkali tidak berbanding lurus. Terbukti sampai saat ini masih banyak pelanggaran berlalu lintas yang terjadi dimana-mana. Padahal dengan menjalankan tertib berlalu lintas maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas saat berkendara. Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai pengguna jalan masih banyak yang tidak mematuhi syarat berkendara, seperti ditemukannya anak dibawah umur yang berkendara, pengendara yang

tidak memakai helm, ugal-ugalan, dan tidak memperhatikan pengguna jalan lain. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak masyarakat yang tingkat kesadarannya masih kurang terhadap hukum berlalu lintas. Akibatnya, tingkat pelanggaran lalu lintas masih menjadi masalah serius yang perlu diperhatikan khususnya di Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas jalan yang memiliki tugas mengatur ketertiban lalu lintas agar dapat berjalan dengan lancar. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah suatu organisasi yang memiliki visi dan misi. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung memakai Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah :

1. Terwujudnya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman, tertib dan terkendali.
2. Terwujudnya pelayanan angkutan umum yang aman dan nyaman.
3. Terwujudnya prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai.

Oleh sebab itu Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung berperan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya ketertiban dalam berlalu lintas. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk menciptakan suatu bentuk kedisiplinan berkendara agar masyarakat lebih patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan sehingga dapat meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan maupun penyimpangan lain ketika berkendara di jalanan umum.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian ini didasarkan pada uraian latar belakang yang telah dikemukakan yaitu bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara dan di Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah pada bagian sebelumnya, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kota Bandar Lampung?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi teoritik

dalam bidang Administrasi Publik, khususnya dalam memberikan gambaran tentang kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas.

- b. Untuk menambah wawasan, gambaran dan informasi-informasi yang berkaitan dengan bidang ilmu dan kegiatan administratif pada Dinas Perhubungan di Kota Bandar Lampung.
- c. Peneliti berharap penelitian ini bisa dijadikan sebuah referensi maupun perbandingan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik atau lokasi penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Turut serta berperan aktif dalam rangka memberikan sumbangan pemikiran terhadap peran Dinas Perhubungan, khususnya dalam bidang lalu lintas. Sehingga dari hasil penelitian ini akan dapat dijadikan tambahan informasi tentang “Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kota Bandar Lampung”.
- b. Dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh instansi terkait yang berhubungan dengan topik pembahasandalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

1. Rahayu Nurfauziah (2021) dengan judul penelitian “Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari Perspektif Konstruksi Sosial”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manusia merupakan faktor yang mendasari pelanggaran lalu lintas akibat manusia itu sendiri karena kurangnya pengetahuan tentang norma lalu lintas manusia sebagai pengguna jalan yakni sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan, baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Remaja khususnya pelajar, sering melakukan pelanggaran lalu lintas seperti: Menggunakan jalan dengan cara yang dapat mengganggu ketertiban atau membahayakan keamanan lalu lintas, atau yang dapat menyebabkan kerusakan jalan. Mengemudikan kendaraan bermotor tanpa Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ), atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan dapat menunjukkannya tetapi masa berlakunya telah berakhir; Mengizinkan atau membiarkan orang lain yang tidak memiliki SIM untuk mengoperasikan kendaraan bermotor; Tidak mematuhi peraturan lalu lintas; Menggunakan kendaraan bermotor di jalanan publik tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah; Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan; Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang. Beberapa bentuk pelanggaran diatas sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas yang berdampak pada Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya; Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam; Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel; Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya

melanggar peraturan.

2. Sophi Rahma Uma (2019) dengan judul penelitian “Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung”. Dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam mewujudkan tertib lalu lintas di Kota Bandar Lampung belum optimal. Berdasarkan tiga indikator yaitu Regulator, Fasilitator dan Evaluator, dapat diketahui bahwa pada indikator Evaluator belum dapat berjalan secara optimal. Lemahnya aspek evaluator dibuktikan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penerapan transportasi kota yang baik dengan penerapan transportasi kota yang baik maka permasalahan kemacetan yang menimbulkan pelanggaran lalu lintas jalan dapat diminimalisirkan.
3. Alfi Rohmatin (2019) dengan judul Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Dalam Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Peran Dinas Perhubungan dalam meningkatkan kesadaran parkir berlangganan masyarakat dilakukan melalui beberapa usaha yaitu sosialisasi, pemasangan banner, pembinaan juru parkir dinas. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi parkir berlangganan dari 75,21 persen pada 2016, meningkat hingga 32,52 persen pada 2017 dan 86,11 persen pada 2018. Sementara kesadaran masyarakat terhadap parkir berlangganan mencapai 14,05 persen pada triwulan I pada tahun 2019. Faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban dalam meningkatkan kesadaran beretribusi parkir berlangganan, yaitu: Faktor internal antara lain: a) sosialisasi parkir berlangganan belum merata diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban, b) masih terdapat juru parkir dinas yang melakukan pungutan parkir. Sedangkan faktor eksternal yang menjadi penghambat adalah masyarakat masih memberikan uang parkir kepada juru parkir dinas.

2.2 Tinjauan Umum

1. Tinjauan Umum Analisis
 - a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan

mengamati sesuatu yang tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari pengamatan yang sudah dilakukan. Komaruddin (2001)

Pengertian analisis menurut Komaruddin adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

b. Harahap (2004)

Menurut Harahap, pengertian analisis adalah suatu upaya untuk memecahkan atau menguraikan sesuatu unit menjadi berbagai unit terkecil.

2.3 Tinjauan Umum Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah peran memiliki arti pemain sandiwara, tukang lawak pada permainan, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

- a. Bernard Raho (dalam buku Teori Sosiologi Modern, 2007) peran sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Sejumlah peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran.
- b. Dougherty dan Pirtchard (dalam buku Role Ambiguity And Role Clarity, 2003) peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan.
- c. Soerjono Soekanto (dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar, 2009) peran merupakan proses dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

2.4 Tinjauan Umum Dinas Perhubungan

Menurut KBBI pengertian dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu. Pengertian perhubungan adalah segala yang berkaitan dengan lalu lintas dan telekomunikasi (seperti jalan, pelayaran, penerbangan, pos).

Dinas Perhubungan adalah suatu lembaga yang terdiri secara mandiri dalam melaksanakan peran pelaksanaan kebijakan berdasarkan pemerintah otonomi daerah, Dinas Perhubungan berperan sebagai manajemen transportasi, Dinas Pekerjaan Umum sebagai bidang penyedia prasarana jalan.

Jadi Dinas perhubungan berperan penting dalam lalu lintas dan angkutan jalan

untuk mengatur transportasi yang beroperasi di lalu lintas seperti angkutan umum/atau angkutan khusus baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan milik swasta yang beroperasi di lalu lintas.

2.6 Tinjauan Umum Peningkatan

Peningkatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1198) adalah menaikkan, mempertinggi, memperhebat. Peningkatan adalah suatu proses untuk merubah ke arah yang lebih baik.

- a. Menurut Adi.S, (2016) Peningkatan adalah Peningkatan berasal dari kata tingkat. Yang berarti lapis atau lapisan dari sesuatu yang kemudian membentuk susunan. Peningkatan adalah usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik dari pada sebelumnya. Suatu usaha untuk tercapainya suatu peningkatan biasanya diperlukan perencanaan dan eksekusi yang baik. Perencanaan dan eksekusi ini harus saling berhubungan dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan.
- b. Menurut Moeliono, (2005) Peningkatan adalah Sebuah cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik. Secara umum, peningkatan merupakan upaya untuk menambah derajat, tingkat, dan kualitas maupun kuantitas. Peningkatan juga dapat berarti penambahan keterampilan dan kemampuan agar menjadi lebih baik. Selain itu, peningkatan juga berarti pencapaian dalam proses, ukuran, sifat, hubungan dan sebagainya.

2.7 Tinjauan Umum Kedisiplinan Berkendara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2014) menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib.

- a. Godwin Tunde, et al. (2012) menyatakan bahwa kedisiplinan berkendara merupakan suatu tindakan pengguna jalan dalam bentuk ketaatan terhadap aturan yang bertujuan untuk membimbing pengguna jalan untuk mematuhi aturan agar terhindar dari konflik antar pengguna jalan, mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Individu yang tidak mematuhi aturan lalu lintas akan mendapatkan hukuman berupa peringatan lisan dan sanksi tilang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

- b. Kedisiplinan berkendara merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas (Ucho et al., 2016).

Berdasarkan pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa kedisiplinan berkendara yaitu suatu sikap dan tingkah laku yang telah terbentuk melalui berbagai proses yang berkaitan dengan ketertiban dan ketaatan terhadap aturan berlalu lintas dimana individu yang melanggar aturan akan mendapatkan peringatan atau sanksi dari pemegang otoritas.

3 KERANGKA PIKIR

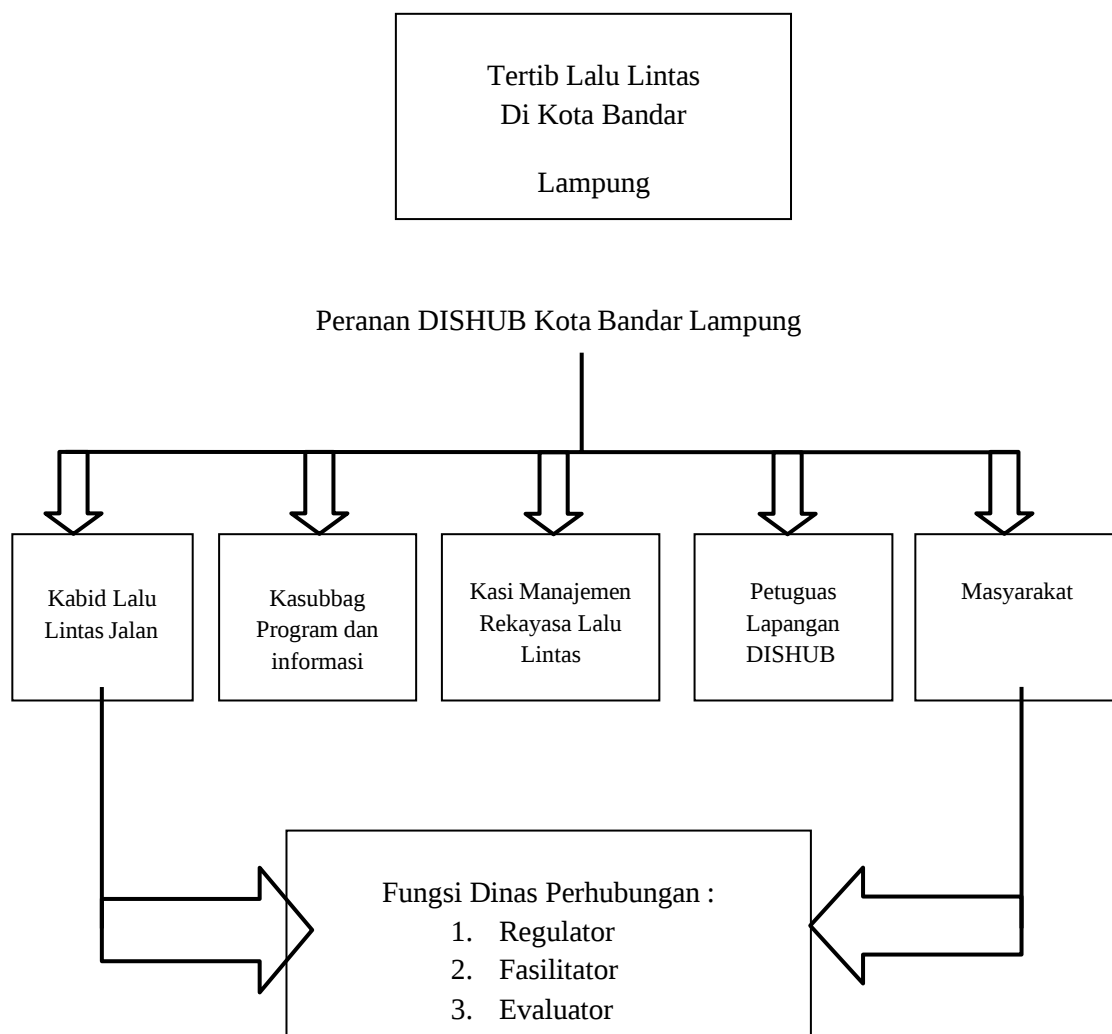
Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Kedisiplinan Berkendara di Kota Bandar Lampung merupakan kemampuan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat guna mencapai tujuan dan misi secara optimal sebagai hasilnya dan berimplikasi pada kesehatan dan kelangsungan hidup organisasi. Dengan pengukuran dan penilaian tentang Peranan ini Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi yang diembankan kepadanya secara optimal dalam melayani masyarakat.

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sektor transportasi mempunyai peran yang penting dalam proses pembangunan karena dapat membantu kelancaran arus lalu lintas dan mobilitas penduduk maupun barang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu kawasan.

Apalagi Kota Bandar Lampung menempati posisi yang strategis sebagai simpul transportasi darat yang mencakup transportasi jalan raya Gerbang Pulau Sumatra ke Pulau Jawa dan sebaliknya maupun jalur kereta api sehingga berakibat pada kepadatan arus lalu lintas.

Indikator yang digunakan dalam mengukur peranan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung ini dapat dilihat dari fungsi Dinas Perhubungan diantaranya

yaitu Pembuat kebijakan (Regulator), Penyedia Fasilitas (Fasilitator) dan Pengawas (Evaluator). Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung tidak terlepas dari faktor-faktor penunjang dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung yang berimplikasi terhadap keberhasilan program kerja yang telah ditetapkan sehingga apakah program kerja tersebut masih perlu diperbaiki lagi atau tidak. Adapun Bagan Kerangka Pemikirannya Sebagai Berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Etta Mamang Sangadji dan Sopiah (2010:24) “Sesuai dengan rumusan masalah serta tujuan dan kegunaan penelitian, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta, objek, atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat. Dengan metode yang digunakan tersebut diharapkan dapat menghasilkan data deskripsi yang baik berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang yang perilakunya dapat diamati, sehingga tergambar dengan jelas bagaimanakah Peran Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kota Bandar Lampung.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan Peran Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kota Bandar Lampung.

3.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti mendeskripsikan hasil penelitian, maka memfokuskan penelitian ini pada Peran Dinas Perhubungan Dalam Peningkatan Kedisiplinan Berkendara di Kota Bandar Lampung yang mencakup indikator perencanaan, pengaturan, perencanaan, pemberdayaan dan pengawasan. Deskripsi fokus merupakan istilah dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam menentukan fokus penelitian dengan ruang lingkup permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti memfokuskan ruang lingkup penelitian pada empat peran pemerintah yang dianggap penting dan relevan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Adapun sub-sub fokus dari fokus penelitian peran Dinas Perhubungan dalam peningkatan kedisiplinan berkendara di Kota Bandar Lampung, yaitu

1. Fungsi pengaturan/regulasi yaitu aturan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur segala hal untuk menciptakan arasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
2. Fungsi pelayanan bagi masyarakat yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia (provide) jasa- jasa layanan publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan birokrasi. Selain itu, dalam fungsi ini pemerintah juga sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan warga terhadap barang dan jasa yang tidak mampu dipenuhi sendiri.
3. Fungsi pemberdayaan, yakni fungsi yang berhubungan dengan suatu keadaan atau kondisi ekonomi, politik dan sosial yang ada. Pemberdayaan harus terus menerus, komprehensif, dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan warga masyarakat.
4. Fungsi pengawasan, pengamanan dan perlindungan, yakni fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, menegakkan keadilan, perlindungan kepada masyarakat serta pelayanan bagi kepentingan masyarakat.

3.4 Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Penelitian ini data didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian, maka yang menjadi sumber dari data primer ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa melalui jurnal atau sumber lain. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal, buku, dan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, maka perlu diterapkan teknik pengumpulan

data berdasarkan pedoman penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan cara datang untuk mengamati sesuatu yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung (Sugiyono, 2011: 245). Apabila ruang lingkup penyelidikannya terbatas pada perilaku manusia, tata cara kerja, fenomena alam, dan hal-hal yang dilihat, maka digunakan teknik pengumpulan data berdasarkan observasi.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2017) menguraikan bahwa wawancara merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih untuk berbagi informasi dan gagasan dengan tanya jawab untuk mengembangkan makna dalam suatu masalah tertentu. Wawancara diterapkan sebagai pendekatan pengumpulan data ketika peneliti ingin memeriksa masalah yang diteliti dengan belajar lebih banyak tentang informan secara mendalam.

3. Studi Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2017) dokumen adalah catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau kreasi monumental yang dibuat oleh seseorang. Dokumen tertulis dapat berupa buku harian, sejarah hidup, arsip, biografi, aturan, dan kebijakan. Dokumen berupa gambar seperti foto, gambar hidup, dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya, seperti karya seni yang dapat berbentuk lukisan, patung, video, dan sebagainya. Studi dokumen berguna untuk melengkapi data dari pendekatan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

3.6 Jenis dan Sumber Data

c) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti. Penelitian ini data didapatkan secara langsung dari lokasi penelitian atau objek penelitian, maka yang menjadi sumber dari data primer ini adalah Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.

d) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, bisa melalui jurnal atau sumber lain. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui studi literatur seperti jurnal, buku, dan lainnya.

3.7 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data dari Miles dan Hubberman (1994), yaitu bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas sampai data jenuh (Sugiyono, 2011: 245). Kegiatan dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses merangkum, memilih dan memfokuskan ke hal-hal yang dianggap pokok dan penting untuk disusun pola dan temanya (Sugiyono, 2011: 247). Akibatnya, data yang direduksi akan menyajikan gambaran yang jelas dan memberi kemudahan peneliti mengumpulkan data dan mencarinya jika diperlukan. Inti dari reduksi data adalah tindakan menggabungkan dan membakukan semua jenis data ke dalam bentuk tekstual sehingga dapat dipelajari.

2. Penyajian Data

Data disajikan dalam bentuk penjelasan ringkas, bagan, korelasi antar kategori, bagan alur, dan alat bantu visual lainnya (Sugiyono, 2011: 249). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang sering diterapkan ialah berbentuk teks naratif. Peneliti dapat lebih mengerti apa yang terjadi dan dapat merancang pekerjaan selanjutnya berdasarkan apa yang diketahui jika data disajikan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan pada penelitian ini merupakan penemuan baru dan belum ada sebelumnya. Temuan ini bisa berbentuk deskripsi atau penggambaran suatu obyek sebelumnya yang masih belum jelas dan menjadi jelas setelah diteliti (Sugiyono, 2011: 253). Kesimpulan harus dikonfirmasi untuk memastikan bahwa kesimpulan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebagai konsekuensinya, diperlukan kegiatan berulang untuk tujuan verifikasi, penelusuran data kembali dengan cepat, sebagai akibat dari pemikiran yang dapat berkembang di benak peneliti saat menyusun penyajian data dengan melihat kembali catatan lapangan secara singkat.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Terdapat empat kriteria yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2011: 270), yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferbility), kebergantungan

(dependability), dan kepastian (confirmability).

1. Derajat Kepercayaan (Credibility)

Dalam penelitian ini, kredibilitas dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan temuan observasi dan fakta di lapangan, serta apakah data atau informasi yang dikumpulkan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sugiyono (2011: 270) mengemukakan bahwa dalam melakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan strategi berikut.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan mengharuskan peneliti kembali ke lapangan untuk menjalankan observasi ulang dan melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang telah ditemui maupun yang belum (Sugiyono, 2011: 270).

b. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan memerlukan pengamatan yang lebih penuh perhatian dan berkelanjutan. Dengan demikian, kepastian fakta dan urutan peristiwa akan terekam secara tepat dan metodis. Peneliti dapat menghasilkan deskripsi data yang tepat dan sistematis tentang apa yang dikaji dengan meningkatkan ketekunan mereka (Sugiyono, 2011: 272).

c. Triangulasi

Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi digambarkan sebagai pemeriksaan data dari banyak sumber dengan cara yang beragam dan pada waktu yang berbeda (Sugiyono, 2011: 273). Dalam hal ini terdapat tiga jenis triangulasi menurut Sugiyono (2011: 274), antara lain:

- 1) Triangulasi sumber yaitu pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data yang sudah didapatkan dari sejumlah sumber.
- 2) Triangulasi teknik yaitu pengujian kredibilitas dengan melakukan pengecekan data terhadap sumber yang sama melalui teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu, karena waktu merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keabsahan data, maka pengumpulan data harus disesuaikan dengan kondisi sumbernya.

d. Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif merupakan kasus yang bertentangan atau menyimpang dari temuan penelitian sampai pada titik tertentu. Melaksanakan analisa kasus

negatif memerlukan pencarian data yang beragam atau bahkan berbenturan dan tidak sejalan dengan temuan sampai diperoleh bukti yang tidak lagi kontradiktif, sehingga data tersebut dapat dipercaya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah bahan yang digunakan peneliti guna penunjang dalam membuktikan data yang didapatkan oleh peneliti. Seperti contohnya, temuan data wawancara perlu dilengkapi oleh rekaman wawancara, gambar atau video selama wawancara untuk membuktikan kredibilitas data yang telah didapatkan.

f. Mengadakan Membercheck

Proses membandingkan data yang dikumpulkan oleh peneliti dengan sumber data dikenal sebagai membercheck. Tujuan membercheck adalah untuk menentukan apakah data yang diambil sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemberi data.

2. Keteralihan (Transferbility)

Nilai transfer ini berkaitan dengan pertayaan, sampai mana penelitian dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam kondisi lain. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan kemampuan transfer dengan menjelaskan gambaran mengenai latar penelitian dan asumsi-asumsi dasar penelitian. Transferabilitas ialah indikator validitas eksternal yang mencerminkan tingkat kebenaran atau penerapan temuan studi kepada masyarakat dari mana sampel itu diambil.

3. Kebergantungan (Dependability)

Keandalan data atau studi dependability diuji dengan beberapa percobaan yang selalu memberikan hasil yang sama. Uji ketergantungan dalam penelitian kualitatif dilaksanakan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan prosedur dalam penelitian.

4. Kepastian (Confirmability)

Uji konfirmabilitas dapat dibandingkan dengan uji kebergantungan dalam penelitian kualitatif. Oleh karena itu pengujian keduanya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian, serta prosedurnya. Jika hasil penelitian merupakan fungsi dari prosedur penelitian yang digunakan, maka penelitian tersebut telah memenuhi kriteria konfirmabilitas.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Mengenai Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara Bandar Lampung berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan Bandar Lampung berbatasan dengan Teluk Lampung. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kecamatan Pesawaran
- c. Sebelah Timur Bandar Lampung berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah. Dinas perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi berdasarkan asas

otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan

Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan darat, perhubungan laut, pos dan telekomunikasi
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pemimpin yang pernah menjabat di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

- a. Tahun 1981 - 1994 cabang dinas LLAJ Kota Madya Bandar Lampung di pimpin oleh I Nengah Mandra, S.H
- b. Tahun 1994 - 1997 cabang dinas LLAJ Kota Madya Bandar Lampung di pimpin oleh Darwis Ali, S.H
- c. Tahun 1997 - 2001 dinas LLAJ II Bandar Lampung dipimpin oleh Ir. Eddy D. Saleh
- d. Tahun 2001 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Zainal Fanani Idris
- e. Tahun 2002-2004 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Zainal Abidin Hasan
- f. Tahun 2004 - 2006 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ruslan HD, S.E
- g. Tahun 2006 - September 2010 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Ir. Eddy D. Saleh
- h. September 2010 - 12 November 2012 Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Drs. Normansyah, M.Si
- i. 12 November - saat ini Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dipimpin oleh Rifa'i, S.E

2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana instansi

pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan Dinas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan dinas selanjutnya. Kehidupan dinas sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu visi dinas juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Adapun visi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah “Penyelenggara Sistem Transportasi Yang Berkualitas”.

Arti visi tersebut adalah terwujudnya sistem transportasi perkotaan yang terpadu, aman, nyaman, dalam menunjang pembangunan Kota Bandar Lampung yang maju dan modern.

Misi merupakan sesuatu yang harus di emban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan dinas dapat terlaksanan dan berhasil dengan baik sesuai visi yang telah ditetapkan dan tugas yang harus diemban dan dilaksanakan oleh dinas perhubungan, telah disusun pula misi dinas yang akan dipergunakan sebagai landasan tujuan utama ke arah mana perencanaan/program dinas ingin dicapai.

Misi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung adalah:

- a. Mewujudkan sumber daya manusia yang handal dan profesional dibidang transportasi
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi
- c. Meningkatkan pelayanan jasa sektor transportasi
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penyelenggaraan transportasi
- e. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah sektor transportasi.

(sumber: Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)

3. Tujuan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

Tujuan dinas perhubungan Kota Bandar Lampung sebagai implementasi dari misi dinas adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan kota Bandar Lampung melalui pendidikan dan pelatihan teknis sub sektor perhubungan maupun diklat dan pelatihan lainnya.
- b. Terpenuhiya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan dan kenyamanan serta kelancaran transportasi
- c. Terkendalinya pelaksanaan pelayanan, pengaturan dan pengawasan serta pengendalian operasional lalu lintas dan angkutan jalan (orang dan barang)
- d. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan program perencanaan pusat dan daerah dalam sektor transportasi.
- e. Menggali dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah yang telah ada maupun potensi pendapatan yang belum dapat di maksimalkan dari sektor transportasi.

4. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas dari kepala dinas, sekretariat, sub-sub bagian atau seksi-seksi

tersebut antara lain :

1. Kepala Dinas

Kepala dinas perhubungan Kota Bandar Lampung mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang diperintahkan oleh Walikota.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang kesekretariatan. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala

dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi,yaitu:

a. Pengelolaan urusan penyusunan program, monitoring, dan evaluasi mempunyai tugas menghimpun dan menyusun program kegiatan, melaksanakan monitoring kegiatan, menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan, melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

b. Pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum, dan menyiapkan rapat dinas. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Pengelolaan urusan keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan atasan Masing-masing sub-bagian dipimpin oleh seorang kepala sub-bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada sekretaris.

3. Sub Bagian Penyusunan Program, monitoring, dan Evaluasi Sub bagian penyusunan program, monitoring, dan evaluasi mempunyai tugas :

a. Menghimpun dan menyusun program kegiatan

b. Melaksanakan monitoring kegiatan

c. Menghimpun dan menyusun pelaporan kegiatan

d. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :

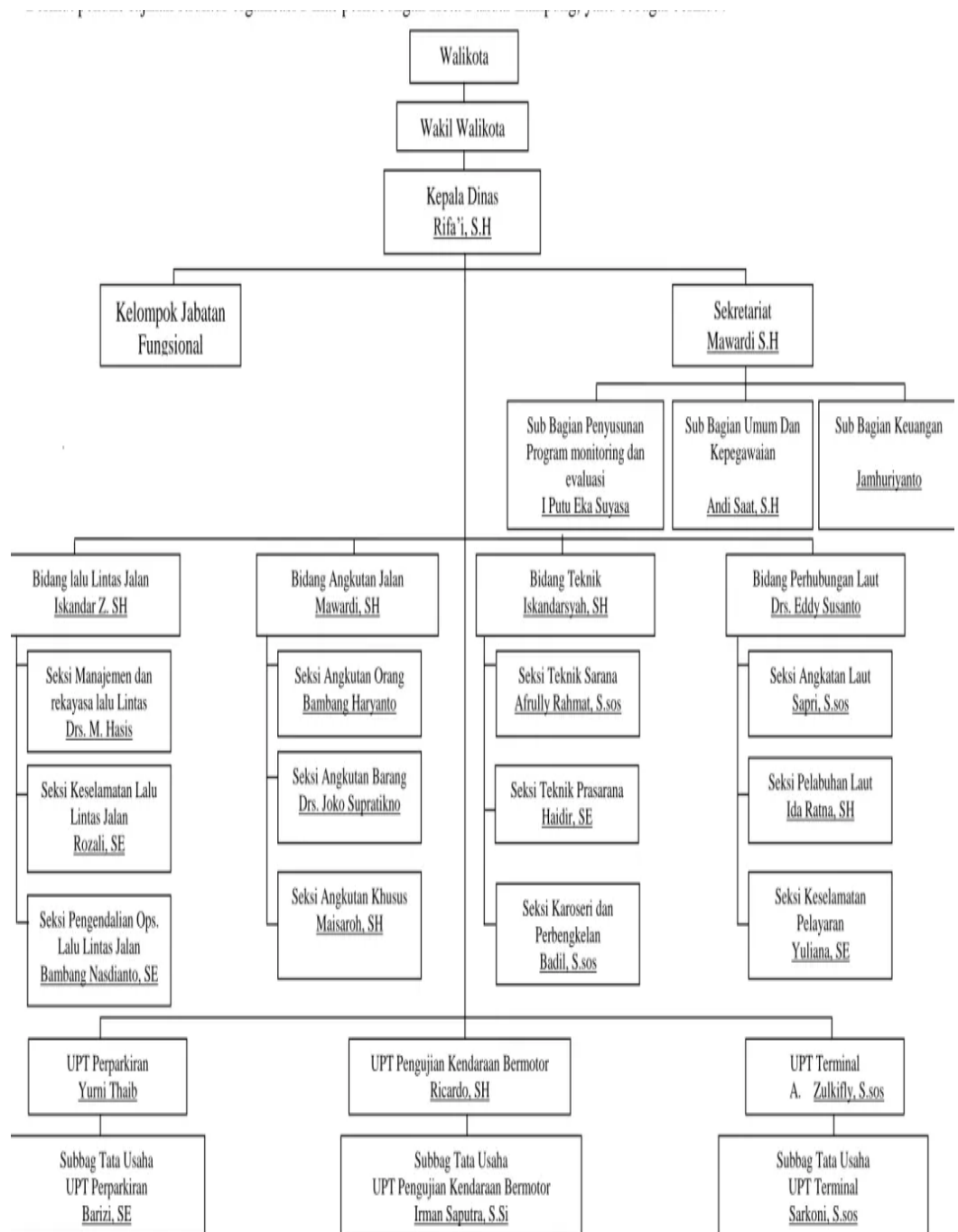
- a. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan, kearsipan dinas, melaksanakan urusan rumah tangga, pengelolaan sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, urusan hukum dan menyiapkan rapat dinas
- b. Melakukan pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai
- c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan Sub bagian keuangan mempunyai tugas:
 - a. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi urusan penyusunan anggaran dinas, administrasi gaji, administrasi perjalanan dinas
 - b. Menyusun pembukuan, pertanggung jawaban keuangan dan pelaporannya
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan

5. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang lalu lintas jalan meliputi manajemen dan rekayasa, keselamatan dan pengendalian operasional lalu lintas jalan. Bidang lalu lintas jalan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas. Untuk melaksanakan tugas, bidang lalu lintas jalan mempunyai tugas :

- a. Perencanaan dan penyusunan program dibidang lalu lintas jalan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dibidang lalu lintas jalan
- c. Pengendalian dan pengaturan lalu lintas jalan
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas dibidang lalu lintas jalan

4.2 Gambaran Umum Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung



Gambar Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung

4.3 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan mengenai kedisiplinan berkendara dapat ditemukan bahwa kedisiplinan berkendara di Kota Bandar Lampung dinilai masih kurang baik. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan telah melakukan berbagai upaya yang dapat menjadi dorongan dalam kedisiplinan berlalu lintas. Kedisiplinan berkendara merupakan suatu sikap patuh dan taat terhadap aturan dan tata tertib yang berlaku dalam lalu lintas. Berkaitan dengan peningkatan disiplin berkendara, Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat signifikan dalam lingkup kesadaran hukum masyarakat di Kota Bandar Lampung. Kesadaran hukum ini merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum berlalu lintas yang ada atau tentang peraturan yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan dan kondisi di lapangan masih ditemukan bahwa masyarakat di Kota Bandar Lampung masih kurang disiplin dalam berlalu lintas. Selain itu, kondisi lalu lintas jalan juga masih banyak yang kurang mendukung dalam peningkatan kedisiplinan berkendara ini. Sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan peran Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung untuk dapat mengatasi serta menjadi aspek yang mampu mendukung peningkatan kedisiplinan berkendara di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka berikut peneliti memberikan pembahasan dari hasil tersebut berdasarkan teori sesuai kerangka penelitian yang telah dilakukan.

1. Pengaturan

Fungsi pengaturan/regulasi yaitu aturan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatur segala hal untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Lebih lanjut, yang menjadi isu utama dari indikator pengaturan oleh Dinas Perhubungan adalah mengenai pemahaman masyarakat tentang rambu-rambu yang merupakan bentuk perintah, larangan, peringatan dan/atau petunjuk yang berlaku di jalanan publik. Hal merupakan aspek penting dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas sebagaimana yang diungkapkan oleh Fatmanta (dalam Wardhana et., al, 2014) bahwa pemahaman terhadap peraturan lalu lintas yang termuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijadikan oleh

pengendara sebagai pedoman saat di jalan raya. Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berisikan mengenai apa yang boleh dilakukan (perintah) dan apa yang tidak boleh dilakukan (larangan) bagi pengguna jalan saat berkendara motor.

2. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan bagi masyarakat yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia (provide) jasa-jasa layanan publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan civil dan birokrasi. Pelayanan ini dapat dikatakan sebagai serangkaian tindakan yang teratur dan berkesinambungan dalam masyarakat. Pelayanan dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan yakni fungsi yang berhubungan dengan suatu keadaan atau kondisi ekonomi, politik dan sosial yang ada untuk mengusahakan dalam membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Pemberdayaan harus terus menerus, komprehensif, dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan warga masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan aspek pemberdayaan dijalankan dengan melaksanakan arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan bantuan teknis lain yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan dan kedisiplinan dalam berkendara.

4. Pengawasan

Fungsi pengawasan, pengamanan dan perlindungan, yakni fungsi pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, menegakkan keadilan, perlindungan kepada masyarakat serta pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Pengawasan dijalankan dengan mengamati dan memantau dengan berbagai cara terhadap apa yang dilakukan, seperti pengamatan langsung terhadap kegiatan di lapangan, membaca laporan, dan berbagai cara lain selama kegiatan operasional berlangsung, untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang terjadi dari rencana dan program yang telah ditentukan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang peneliti peroleh berdasarkan hasil penelitian, yakni:

1. Pengaturan

Pengaturan dijalankan dengan memperhatikan sejumlah titik yang belum dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Selain itu, Dinas Perhubungan aktif dalam melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Akan tetapi, Dinas Perhubungan dinilai masih belum maksimal dalam menjalankan kegiatan perekayasaan secara maksimal sesuai peraturan menteri terkait karena masih banyak titik-titik yang masih belum dilengkapi dengan petunjuk jalan sedangkan pengadaan dan pemeliharaan marka jalan, sementara perekayasaan tersebut merupakan kewajiban dari Dinas Perhubungan.

2. Pelayanan

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dilaksanakan dengan mengacu pada tugas pokok Dinas Perhubungan. Pada pelaksanaan tugas ini, masih ditemukan sejumlah masalah yang timbul tidak hanya dari masyarakat tetapi juga internal organisasi. Hal tersebut mencerminkan bahwa pelayanan yang dilakukan Dinas Perhubungan masih belum mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang diselenggarakan secara rutin oleh internal Dinas Perhubungan dalam rangka meningkatkan kemampuan aparatur agar dapat menjadi contoh dan perantara dalam merealisasikan kedisiplinan berkendara kepada masyarakat.

4. Pengawasan

Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melaksanakan pengawasan mulai dari realisasi perencanaan, identifikasi masalah lalu lintas, serta

laporan-laporan yang masuk mengenai masalah yang terjadi pada lalu lintas publik yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari perbaikan dan peningkatan kedisiplinan lalu lintas. Dalam mendukung pengawasan ini, Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung melakukan penertiban dan pengaturan jalan secara rutin setiap hari dan menugaskan petugas untuk melakukan penjagaan di beberapa lokasi pusat arus lalu lintas yang dianggap perlu untuk dipantau.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menyarankan:

1. Diperlukan adanya penambahan anggaran untuk meningkatkan jumlah sarana dan prasarana dalam pengadaan dan pemeliharaan kelengkapan fasilitas jalan.
2. Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
3. Dihimbau kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas yang ada, serta mematuhi rambu-rambu yang telah terpasang.

DAFTAR PUSTAKA

- Uma, S. R. (2019). Peran Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung.
- JUNAIDI, A. PERAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN JEMBER DALAM MELAKUKAN REKAYASA LALU LINTAS JALAN TAHUN.
- LIANA, Y. S. (2022). PERSPEKTIF MAQASYID SYARI'AH TERHADAP PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi di Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Fais, A., Parawu, H. E., & Haerana, H. (2023). PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN BERKENDARA DI KABUPATEN LUWU UTARA. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 4(1), 1-13.
- Setiawan, Jerry, 2014. “ Latar Belakang Perilaku Remaja Dalam Mengemudikan Sepeda Motor Tanpa Surat Izin Mengemudi. Studi Kasus Pelajar SMPN 11 Kota Samarinda”. Universitas Mulawarman.
- Wicaksono, A., Dwi Nurhayati, O., & Septiana, R. (2020). GAME EDUKASI APALIN (AYO PATUHI ATURAN LALU LINTAS) UNTUK PENGECEKAN PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- BudayaTertibLaluLintas. N.p., PT Balai Pustaka (Persero), 2011.
- Kadar, Abdul, and Sulisty, Hermawan. *Melanggar rambulalulintas, siapasalaha?.* Indonesia, Pensil- 324, 2006.
- IbuBabeLaluLintas:PosTheatreKeselamatan Mobile. N.p., Satlantas Polres Kudus, 2015.
- Astuti, R. F., & Suwanda, I. M. (2015). Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya Pada Remaja Di Desa Petak, Pacet, Mojokerto. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(3), 831–845.
- Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 50 Tahun 2016 tanggal 1 November 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung.
- Rohmatin, A. (2019). Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Dalam

Meningkatkan Kesadaran Parkir Berlangganan. Universitas Negeri Semarang. Yahaya, A. (2006). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori, Analisis & Interpretasi Data. PTS Professional. Syuwaikh, 'Adil. (1997). Disiplin. Pustaka Salam.

Astuti, R. F., & Suwanda, I. M. (2015). Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya Pada Remaja Di Desa Petak, Pacet, Mojokerto. Kajian Moral Dan Kewarganegaraan, 2(3), 831–845.

Bungin, B. (2010). Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kencana Prenada Media Group.

Rompas¹, G. A. C., Tewal, B., & Dotulong, L. O. (2018). Pengaruh gaya kepemimpinan, pengawasan, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Minahasa Tenggara. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 6(4).

Fais, A., Parawu, H. E., & Haerana, H. (2023). PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENINGKATAN KEDISIPLINAN BERKENDARA DI KABUPATEN LUWU UTARA. KajianIlmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 4(1), 1-13.

Moleong, L. J. (2000). Metodologi penelitian kualitatif, cet. XI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Analisis Kebutuhan Diklat Dinas Perhubungan (dengan aspek organisasional, jabatan, dan individu). (n.d.). (n.p.): Penerbit Adab.

